



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

RENCANA KERJA

BALAI KIPM MEDAN I

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas atas pencapaian sasaran strategis dan pemenuhan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I (BPPMHKP Medan I) menyusun Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2025. Rencana kinerja ini disusun berdasarkan hasil Perjanjian Kinerja dan sekaligus sebagai gambaran inisiatif dan kemampuan yang akan dilakukan dalam menjalankan visi, misi, tugas dan fungsi Balai KIPM Medan I.

Rencana Kinerja Balai KIPM Medan I Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan peningkatan kinerja bagi internal Balai KIPM Medan I, RKT ini disusun berdasarkan acuan yang terdapat di dalam Rencana Strategis Balai KIPM Medan I Tahun 2025-2029, dengan sedikit perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan yang ada dan realisasi tahun sebelumnya.

Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai lingkup Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I atas waktu, tenaga dan pemikiran yang diberikan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini.



Deli Serdang, 31 Januari 2025
Kepala Balai KIPM Medan I

Nandang Koswara, S.TP., M.M

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
 BAB I PADAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas dan Peran Organisasi	1
1.3. Tujuan	2
1.4. Manfaat	3
1.5. Sasaran.....	3
 BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN	 4
2.1. Rencana Strategis, Visi dan Misi	4
2.2. Arah Kebijakan	5
2.3. Sasan Kegiatan dan Indikator Kinerja	6
 BAB III PENUTUP	 15
 LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selanjutnya Menteri Kelautan dan Perikanan mengamanatkan bahwa Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan harus dijabarkan dalam Rencana Aksi Kegiatan Unit Eselon I.

Sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sehingga Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk kurun waktu tahun 2025– 2029 dituangkan dalam bentuk Rencana Strategi (Renstra). Rencana Strategis BPPMHKP 2025 – 2029 ini masih berlandaskan kepada kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan dengan Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029 dibidang Kelautan dan Perikanan yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Setelah Renstra ditetapkan, perlu dilakukan penjabaran dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk itu setiap unit pelaksana teknis yang mengampu program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, perlu menyusun Rencana Aksi Program atau Rencana Aksi Kegiatan.

Didalam penjabaran per tahun Rencana Aksi Kegiatan Balai KIPM Medan I 2025-2029, maka dibuatlah dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 yang tetap harus menjaga keselarasan terhadap dokumen dokumen diatasnya (Renstra, RPJMN).

1.2. Tugas dan Peran Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara adalah pengaturan mengenai pokok-pokok organisasi kementerian negara dan Perpres ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan organisasi kementerian negara yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Sebagai dasar hukum kelembagaan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu perubahan dari Perpres No. 02 Tahun 2017 tentang pengesahan pembaharuan dan pembentukan BKIPM menjadi Perpres No. 38 Tahun 2023 dalam Organisasi dan Tata Kerjanya, KKP tetap mempertahankan unsur RENCANA KERJA TAHUNAN BALAI KIPM MEDAN I TAHUN 2025 pengendalian mutu dengan membentuk Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), maka pembangunan BPPMHKP merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan

kelautan dan perikanan.

Peran pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan menjadi ujung tombak pembangunan usaha kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya di lini terdepan, yaitu sebagai instrumen perlindungan sumberdaya hayati perikanan dan akses perdagangan bagi produk-produk perikanan. Peranan strategis dari pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam menjaga serta menjamin mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok melalui quality assurance, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak baik nasional maupun internasional dalam rangka meningkatkan keberterimaan dan daya saing kelautan dan hasil perikanan Indonesia. Dengan demikian peranan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan antar negara maupun antar area di dalam wilayah Negara Indonesia. Semakin meningkatnya kegiatan lalu lintas hasil perikanan sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 8 Tahun 2025 tentang BPPMHKP yang mendapat mandat sebagai otoritas kompeten dalam pelaksanaan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, antara lain berperan dalam pelaksanaan sertifikasi inspeksi dan surveillance. Dengan demikian peranan BPPMHKP dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Oleh karena itu Balai KIPM Medan I sebagai UPT BPPMHKP dituntut untuk mampu, meningkatkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan program KKP melalui ekonomi biru. Dengan demikian peran UPT Balai KIPM Medan I cukup strategis dalam rangka ikut mendukung terwujudnya Indonesia Penghasil Produk kelautan dan Perikanan Terbesar dengan menciptakan pelayanan ekspor dan antar area komoditi perikanan yang lancar, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. RENCANA KERJA TAHUNAN BALAI KIPM MEDAN I TAHUN 2025

1.3. Tujuan

Tujuan disusun Rencana Kerja Tahunan Balai KIPM Medan I Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai acuan dalam penyusunan rencana strategis, perencanaan, penganggaran dan evaluasi program/kegiatan pada tahun 2025.
2. Memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Balai KIPM Medan I pada tahun 2025.

1.4. Manfaat

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 merupakan penjabaran dan mengacu dari RPJMN 2020- 2024 dan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025 – 2029. RKT adalah upaya untuk menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan Balai KIPM Medan I dalam kurun waktu 1 tahun kedepan yaitu sepanjang tahun 2025.

1.5. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Kinerja Tahunan Pembangunan Balai KIPM Medan I adalah tersedianya Rencana Kinerja Tahunan Balai KIPM Medan I Tahun Anggaran 2025 sebagai tindak lanjut dari RPJM tahun 2025 - 2029 yang akan dijadikan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) BPPMHKP Tahun Anggaran 2025 serta memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai oleh Balai KIPM Medan I pada tahun 2025.

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN

2.1. Rencana Strategis, Visi dan Misi

Pembangunan kelautan dan perikanan mempunyai peranan strategis dalam menunjang perekonomian Indonesia sebagai Negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan. Akan tetapi peran sektor kelautan dan perikanan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan khususnya dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat kelautan dan perikanan Indonesia. Oleh karena itu dalam upaya memperkuat peranan sektor kelautan dan perikanan maka Kementerian kelautan dan perikanan menetapkan visi pembangunan kelautan dan perikanan dalam “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”, dengan pilar misi “Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan”.

Kaitannya dengan mandat organisasi yang diemban oleh BPPMHKP (Badan Pengendalian dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan), maka aspek yang berkaitan dengan visi KKP di atas adalah dukungan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam memastikan produk perikanan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

Visi BPPMHKP ditetapkan sesuai dengan Visi KKP 2025-2029 yaitu untuk mendukung Visi Presiden dan wakil Presiden “Menyelenggarakan dan Melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38 Tahun 2023, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka Balai KIPM mempunyai misi yang sejalan dengan misi BPPMHKP, yaitu :

- Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan melalui inspeksi, sertifikasi, surveilans, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring.
- Meningkatkan penerapan praktik yang baik di setiap rantai pasok dan kepatuhan terhadap pemenuhan standar mutu hasil kelautan dan perikanan.
- Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional.
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Balai KIPM Medan I sebagai Unit Pelaksana Teknis RENCANA KERJA TAHUNAN BALAI KIPM MEDAN I TAHUN 2025 BPPMHKP mengemban tugas menyelenggarakan Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPMHKP menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
 - b. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan

- pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- d. Pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

2.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi memuat langkah-langkah yang berupa program- program indikatif untuk menyelesaikan masalah yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Program-program tersebut mencakup kegiatan- kegiatan prioritas dalam RPJMN yang sesuai dengan bidang perkarantinaaan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Dengan berbagai kebijakan, komitmen perjanjian kerjasama (MoU/MRA) dan ketentuan perjanjian bilateral, regional dan multilateral dalam perdagangan internasional, serta lahirnya PerPres Nomor 38 Tahun 2023 tentang BPPMHKP telah memperluas cakupan fungsi nya dalam penyelenggaraan jaminan mutu, keamanan hayati ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan saat ini. Saat ini berdasarkan PerPres Nomor 38 Tahun 2023, tujuan penyelenggaraan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah:

1. Pengelolaan sistem manajemen mutu laboratorium dan lembaga inspeksi dibidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
2. Pengelolaan sistem ketertelusuran dibidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
3. Pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan contoh uji, penerbitan sertifikat, surveilans pada sertifikasi mutu penanganan, pengelolaan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan; RENCANA KERJA TAHUNAN BALAI KIPM MEDAN I TAHUN 2025;
4. Pelaksanaan inspeksi pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan contoh uji, penerbitan sertifikat, surveilans pada sertifikasi mutu penanganan, pengelolaan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan;
6. Penyusunan kebijakan teknis inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan pengujian contoh uji, penerbitan sertifikat serta surveilans pada sertifikasi mutu produksi sumberdaya kelautan, penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan.

Titik berat tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah untuk mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan daya saing guna meningkatkan

kinerja ekspor perikanan, serta mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif. Arah kebijakan dan strategi tahun 2025 – 2029 untuk mewujudkan 6 (enam) tujuan BPPMHKP dan dukungannya terhadap mandat yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi BPPMHKP adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standard dan regulasi nasional;
2. Mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.;
3. Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan mutu produk hasil kelautan dan perikanan;
4. Mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan dwelling RENCANA KERJA TAHUNAN BALAI KIPM MEDAN I TAHUN 2025 time pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan join inspection dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai BPPMHKP – KKP;
5. Memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi publik;
6. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian laboratoris, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian;
7. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analisis data;
8. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBP adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBP berbasis digital.

2.3. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2025-2029, maka sasaran kegiatan dan kondisi outcome/impact yang ingin dicapai Balai KIPM Medan I telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur

dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur. Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Indikator kinerja merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan yang akan dicapai dalam pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, oleh karena itu Balai KIPM Medan I telah menyusun Indikator Kinerja Utama yang dituangkan secara detail dalam tabel dibawah ini.

INDIKATOR KINERJA
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN I
TAHUN 2025

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR
1.	Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Medan I (%)	$\%X = \frac{A+B+C+D+E}{xn} \times 100\%$ %X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB B = Persentase Unit menerapkan CPIB C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB E = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal xn = Jumlah dari unsur pembentuk	Balai KIPM Medan I
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Medan I (%)	$\%X = \frac{A+B}{xn} \times 100\%$ %X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk	Balai KIPM Medan I

				B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP xn = Jumlah dari unsur pembentuk (2)	
		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai KIPM Medan I (Lokasi)	Menghitung jumlah Lokasi wilayah perairan yang dilakukan pengambilan sampel dan dilakukan pengujian marine biotoxin dan logam berat	Balai KIPM Medan I
		4.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai KIPM Medan I (Lokasi)	Menghitung jumlah kab/kota yang menjadi lokasi pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik	Balai KIPM Medan I
		5.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Medan I (%)	$x \frac{A - B}{A}$ x = Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%) A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan	Balai KIPM Medan I
2.	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	6.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Medan I (Nilai)	$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$ Rata-rata nilai tingkat pemenuhan klausa dalam ISO 17025 yang terverifikasi $\bar{X}$ = Rata rata $x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n$ = Nilai tingkat pemenuhan ke – 1, 2 , 3, .., n n = banyaknya nilai tingkat pemenuhan	Balai KIPM Medan I

		7.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Medan I (Nilai)	$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$ Rata-rata nilai tingkat pemenuhan klausa dalam ISO 17020 yang terverifikasi $\bar{X}$ = Rata rata $x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n$ = Nilai tingkat pemenuhan ke – 1, 2 , 3, ..., n n = banyaknya nilai tingkat pemenuhan	Balai KIPM Medan I																											
3.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	8.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Medan I (Nilai)	$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$ - Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. <table> <tr> <th>No</th> <th>Uraian Indikator IKPA</th> <th>Bobot (%)</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Revisi DIPA</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Deviasi RPD</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Penyerapan Anggaran</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Belanja Kontraktual</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Penyelesaian Tagihan</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Pengelolaan UP dan TUP</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Dispensasi SPM</td> <td>(Pengurang Nilai IKPA)</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Capaian Output</td> <td>25</td> </tr> </table>	No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)	1	Revisi DIPA	10	2	Deviasi RPD	15	3	Penyerapan Anggaran	20	4	Belanja Kontraktual	10	5	Penyelesaian Tagihan	10	6	Pengelolaan UP dan TUP	10	7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)	8	Capaian Output	25	Balai KIPM Medan I
No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)																														
1	Revisi DIPA	10																														
2	Deviasi RPD	15																														
3	Penyerapan Anggaran	20																														
4	Belanja Kontraktual	10																														
5	Penyelesaian Tagihan	10																														
6	Pengelolaan UP dan TUP	10																														
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)																														
8	Capaian Output	25																														
		9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Medan I (Nilai)	NKA Unit Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut:	Balai KIPM Medan I																											

				<table><tr><th>Variabel</th><th>Uraian</th><th>Bobot (%)</th></tr><tr><td>Efektivitas (75%)</td><td>1. Capaian Indikator RO</td><td>75</td></tr><tr><td rowspan="2">Efisiensi (25%)</td><td>1. Nilai Efisiensi <u>Satker</u></td><td>10</td></tr><tr><td>2. Efisiensi SBK</td><td>15</td></tr></table> $NKPA\ Satker = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$ Keterangan: NKA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker CRO : Capaian RO PenggunaanSBK : Penggunaan SBK NEAlokasi : Nilai Efektivitas Alokasi WCRO : Bobot Capaian RO WpenggunaanSBK : Bobot Penggunaan SBK WEAlokasi : Bobot Efisiensi Alokasi	Variabel	Uraian	Bobot (%)	Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator RO	75	Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi <u>Satker</u>	10	2. Efisiensi SBK	15	
Variabel	Uraian	Bobot (%)														
Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator RO	75														
Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi <u>Satker</u>	10														
	2. Efisiensi SBK	15														
		10.	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Medan I (%)	$\frac{\text{Jumlah nilai temuan BPK pada LK Unit Eselon I Tahun 2024}}{\text{Jumlah realisasi anggaran Unit Eselon I Tahun 2024}} \times 100\%$	Balai KIPM Medan I											
		11.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Medan I (Indeks)	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} \cdot R_{1j}$$IP_2 = W_{2k} \cdot R_{2k}$$IP_3 = W_{3l} \cdot R_{3l}$$IP_4 = W_{4m} \cdot R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP₄ = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} \cdot R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j $W_{2k} \cdot R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k $W_{3l} \cdot R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l $W_{4m} \cdot R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m	Balai KIPM Medan I											
		12.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Medan I (Nilai)	Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM	Balai KIPM Medan I											

			SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat Jenderal. Kategori nilai PM SAKIP Unit Eselon I yaitu: <table> <tr> <th>Kategori</th> <th>Nilai</th> <th>Predikat</th> </tr> <tr> <td>AA</td> <td>>90 – 100</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>>80 – 90</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>>70 – 80</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>>60 – 70</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>>50-60</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>>30 – 50</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>0 – 30</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> </table>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 – 50	Kurang	D	0 – 30	Sangat Kurang	
Kategori	Nilai	Predikat																										
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																										
A	>80 – 90	Memuaskan																										
BB	>70 – 80	Sangat Baik																										
B	>60 – 70	Baik																										
CC	>50-60	Cukup																										
C	>30 – 50	Kurang																										
D	0 – 30	Sangat Kurang																										
		13.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Medan I (%)	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja}} \times 100\%$	Balai KIPM Medan I																							
		14.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Medan I (%)	Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP = <u>Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP</u> x 100% Pagu Pengadaan Barang/Jasa Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut	Balai KIPM Medan I																							

				akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.	
		15.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Balai KIPM Medan I (%)	Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen system antikorupsi, yang meliputi : a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%) b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%) c. Penanganan pengaduan masyarakat dan WBS (bobot 15%) d. Penanganan benturan kepentingan (bobot 15%) e. Pelaporan Harta Kekayaan (LHKAN) (bobot 15%) f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) Secara lebih rinci indicator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.	Balai KIPM Medan I
		16.	Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai KIPM Medan I (Unit)	Proposal inovasi yang masuk kedalam berita acara tim penilai internal KKP dengan nilai minimum 77. Capaian hasil dihitung dengan rumus : $\text{Nilai Capaian} = \frac{N1 + N2 + N...}{\text{Total N}}$ Keterangan : N1 = Nilai Proposal 1 N2 = Nilai Proposal 2	Balai KIPM Medan I

				Total N = Jumlah Proposal yang diajukan Nilai capaian = capaian hasil	
		17.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Medan I (Nilai)	Bobot Nilai rata-rata tertimbang = $\frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111$ Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut: $IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur} \times \text{Nilai penimbang Total unsur yang terisi}}{\text{Total unsur yang terisi}}$ Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: $IKM \text{ unit pelayanan} \times 25$	Balai KIPM Medan I

BAB III PENUTUP

Penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2025 Balai KIPM Medan I berpedoman pada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Pelaporan Kinerja. Rencana Kinerja Tahun 2025 Balai KIPM Medan I tahun 2025 memuat Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja yang diselaraskan dengan Program/Kegiatan dan Anggaran yang akan dilaksanakan dan dicapai pada Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan rencana kerja ini mengacu pada Rencana Strategis 2020- 2025 Lingkup Balai KIPM Medan I, yang dirinci lebih lanjut dalam Rencana Kinerja (Renja) . Diharapkan dalam pelaksanaannya selaras dengan kebijakan, program dan kegiatan dalam mencapai visi, sasaran dan tujuan organisasi khususnya di Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I dapat terlaksana dengan baik. Rencana Kinerja (Renja) ini merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) di Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I.

Dengan demikian diharapkan terdapat keselarasan antara Renstra, Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan kegiatan yang tercantum di dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), serta adanya keterkaitan dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

LAMPIRAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN I

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Nandang Koswara**

Jabatan : Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**

Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Medan I



Ditandatangani
Secara Elektronik

Nandang Koswara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN I

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Medan I (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Medan I (%)	70
		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai KIPM Medan I (Lokasi)	1
		4.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai KIPM Medan I (Lokasi)	1
		5.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Medan I (%)	99
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	6.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Medan I (Nilai)	75
		7.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Medan I (Nilai)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	8.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Medan I (Nilai)	92
		9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Medan I (Nilai)	71,5
		10.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Medan I (%)	100
		11.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Medan I (Indeks)	87
		12.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Medan I (Nilai)	86
		13.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Medan I (%)	85
		14.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Medan I (%)	76

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		15	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Balai KIPM Medan I (%)	70
		16.	Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai KIPM Medan I (Unit)	1
		17.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Medan I (Nilai)	88

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4.231.318.000
2.	Manajemen Mutu	84.000.000
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	158.000.000
Total Anggaran Balai KIPM Medan I Tahun 2025		4.473.318.000

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama
Kepala Balai Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Medan I



Ditandatangani
Secara Elektronik

Nandang Koswara

**RENCANA AKSI
BALAI KIPM MEDAN I
TAHUN 2025**

Sasaran	Indikator Kinerja	Unit PJ	Kegiatan	Alokasi Anggaran	Target Kegiatan	Satuan Target	Target Kegiatan Berkala												
							Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Des	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)												
Kegiatan 1. Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan																			
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Medan I (%)	Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer	Lembaga Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang divalidasi	200.000.000	70	Lembaga	0	0	70	0	0	70	0	0	70	0	0	70
	2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Medan I (%)	Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen	UPI yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	40.000.000	70	Lembaga	0	0	70	0	0	70	0	0	70	0	0	70
	3	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai KIPM Medan I (Lokasi)	Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer	Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya	25.000.000	1	Produk	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	4	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai KIPM Medan I	Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen	Produksi Kelautan dan Perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi	190.000.000	1	Produk	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	5	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Medan I (%)	Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen	Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impor-nya	15.000.000	99	Produk	0	0	99	0	0	99	0	0	99	0	0	99
Kegiatan 2. Manajemen Mutu																			
Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	6	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Medan I (Nilai)	Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Manajemen Mutu	Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	19.500.000	75	Rekomendasi Kebijakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75
				Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan	130.000.000		Rekomendasi Kebijakan												
				Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu	25.000.000		Lembaga												

Sasaran	Indikator Kinerja	Unit PJ	Kegiatan	Alokasi Anggaran	Target Kegiatan	Satuan Target	Target Kegiatan Berkala											
							Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dev
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)											
			Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium	60.000.000		Lembaga												
	7 Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Medan I (Nilai)	Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Manajemen Mutu	Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan	9.500.000	75	Produk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75
Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan																		
Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP	8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Medan I (Nilai)	Ka Subbagian Umum / Ka Timja Dukungan Manajerial	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	175.014.000	92	Dokumen	0	0	0	0	0	85	0	0	0	0	0	92
	9 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Medan I (Nilai)	Ka Subbagian Umum / Ka Timja Dukungan Manajerial	Layanan Manajemen Keuangan	71.676.000	71,5	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,5
	10 Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Medan I (%)	Ka Subbagian Umum / Ka Timja Dukungan Manajerial	Layanan Manajemen Keuangan	71.676.000	100	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	11 Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Medan I (Indeks)	Ka Subbagian Umum / Ka Timja Dukungan Manajerial	Layanan Umum	336.690.000	87	Layanan	0	0	0	0	0	81	0	0	0	0	0	87
	12 Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Medan I (Nilai)	Ka Subbagian Umum / Ka Timja Dukungan Manajerial	Layanan Perkantoran	12.110.574.000	86	Layanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86
	13 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai	Ka Subbagian Umum / Ka Timja Dukungan Manajerial	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	175.014.000	85	Dokumen	0	0	85	0	0	85	0	0	85	0	0	85
	14 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Medan I (%)	Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Manajemen Mutu & Ka Subbagian Umum / Ka Timja Dukungan Manajerial	Layanan Perkantoran	12.110.574.000	76	Layanan	0	0	76	0	0	76	0	0	76	0	0	76
	15 Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Balai KIPM Medan I (%)	Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Manajemen Mutu & Ka Subbagian Umum / Ka Timja Dukungan Manajerial	Layanan Umum	336.690.000	70	Dokumen	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	70

Sasaran	Indikator Kinerja	Unit PJ	Kegiatan	Alokasi Anggaran	Target Kegiatan	Satuan Target	Target Kegiatan Berkala											
							Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dev
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)											
	16 Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai KIPM Medan I (Unit)	Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Manajemen Mutu & Ka Subbagian Umum / Ka Timja Dukungan Manajerial	Layanan Umum	336.690.000	1	Layanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	17 Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Medan I (Nilai)	Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer & Ka Subbagian Umum / Ka Timja Dukungan Manajerial	Layanan Umum	336.690.000	88	Layanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88

Deli Serdang, 04 Februari 2025



Diketahui,
Kepala Balai,

Mandang Koswala, S.TP., M.M